

DINAMIKA EKONOMI KETENAGAKERJAAN PERTANIAN : PERMASALAHAN DAN KEBIJAKAN STRATEGIS PENGEMBANGAN

The Dynamic of Agricultural Employment Economy: Problems and Policy Development Strategy

Supriyati

*Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Jl. A. Yani No. 70, Bogor 16161*

ABSTRACT

Development economic thinkers realize the important role of agricultural sector in economic development. This paper reviewing the problems and strategies of the economic development of agricultural employment, especially on these aspects: (1) Agricultural sector as a pillar of labor absorption in rural areas; (2) High disguised unemployment; (3) Agricultural labor has a low education level; and (4) Increasing the elderly agricultural labor and decreasing the interest of the young age people to work in agricultural sector. The results of the study show that ratio of government expenditure for agricultural sector on Gross Domestic Product (GDP) was decreasing, from 8.7 percent during PELITA IV to 3.6 percent during PELITA VI. Agricultural sector bear a heavy burden with GDP ranges from 13.0 to 14.4 percent (2005-2009) but should absorb 42 to 43 million of labor force (2005-2009). The average of education level is very low which affect the Human Development Index (HDI) of Indonesia. There is a shift of agricultural labor composition, increasing the elderly labor and decreasing the young age labor. Several relevant policy strategies are: (1) Strengthening politic in agricultural sector; (2) accelerate transformation process through the transition of agro-based industrial development (3) improvement of formal, non-formal, and in-formal education; and (4) changing young generation thought on the stigma of underdeveloped agriculture through character building of young generation and incentive and facilitative policy, agribusiness development and agro-based industry on superior commodity.

Key words: *labor, employment opportunity, agricultural sector*

ABSTRAK

Para pemikir ekonomi pembangunan telah lama menyadari peranan sektor pertanian dalam pembangunan perekonomian. Tulisan ini mengulas permasalahan dan strategi pengembangan ekonomi ketenagakerjaan pertanian, khususnya dalam aspek (1) Sektor pertanian menjadi tumpuan penyerapan tenaga kerja di perdesaan; (2) Pengangguran tidak kentara di sektor pertanian yang relatif tinggi; (3) Pendidikan tenaga kerja sektor pertanian masih rendah; dan (4) Meningkatnya tenaga kerja berusia lanjut dan kurang minatnya generasi muda bekerja di sektor pertanian. Hasil kajian menunjukkan terjadinya penurunan rasio alokasi pengeluaran pemerintah untuk sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yaitu 8,7 persen pada PELITA IV menjadi 3,6 persen pada PELITA VI. Sektor pertanian harus menanggung beban yang berat dengan PDB sebesar 13,0-14,4 persen (2005-2009), tetapi masih harus menyerap tenaga kerja 42-

43 juta tenaga kerja. Rata-rata tingkat pendidikan masih tergolong rendah sehingga mempengaruhi indeks pembangunan manusia (*Human Development Index/HDI*) Indonesia. Pergeseran komposisi pekerja sektor pertanian yaitu peningkatan pekerja pertanian yang berusia lanjut dan terdapat indikasi kurang terariknya generasi muda memasuki dunia pertanian. Beberapa strategi kebijakan yang relevan adalah : (1) memperkuat politik pertanian; (2) mempercepat proses transformasi melalui transisi pengembangan agroindustri; (3) meningkatkan pendidikan baik formal, nonformal, maupun informal; dan (4) merubah pandangan generasi muda tentang stigma pertanian terbelakang melalui pembentukan karakter pemuda serta kebijakan insentif dan fasilitatif pengembangan agribisnis dan agroindustri berbasis komoditas unggulan.

Kata kunci: *ketenagakerjaan, kesempatan kerja, sektor pertanian*

PENDAHULUAN

Para pemikir ekonomi pembangunan telah lama menyadari peranan sektor pertanian dalam pembangunan perekonomian secara keseluruhan, terutama pada tahap-tahap awal pembangunan (Lewis, 1954; Johnston dan Mellor, 1961; Kuznet, 1964). Keberhasilan pembangunan perekonomian Indonesia tidak terlepas dari keberhasilan pembangunan pertanian sejak Pelita (Pembangunan Lima Tahun) digulirkan pada tahun 1970-an. Pada awal Pelita, sektor pertanian memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi dan dijadikan andalan dalam menyerap tenaga kerja. Secara umum dapat dikatakan perubahan struktur perekonomian merupakan suatu proses yang harus dilalui dalam pembangunan suatu negara. Timmer (2005) mengelompokkan peranan sektor pertanian dalam perekonomian bangsa ke dalam 4 tahapan, yaitu: (1) tahap “*getting agriculture moving*”—era Mosher, (2) tahap dimana sektor pertanian telah mempunyai banyak keterkaitan dengan sektor lainnya-era Johnston-Mellor, (3) tahap dimana pendapatan dari sektor pertanian jauh tertinggal dibanding sektor nonpertanian- era Schultz, dan (4) tahap dimana sektor pertanian telah terintegrasi penuh dengan sektor lainnya termasuk di dalamnya pasar tenaga kerja dan pasar modal- era Johnson Gale. Ke empat tahap ini haruslah dipahami dengan benar dalam melihat peranan sektor pertanian terhadap pembangunan perekonomian.

Sejak terjadinya reformasi ekonomi (1983), telah terjadi beberapa perubahan seperti rasio pengeluaran pemerintah untuk sektor pertanian terhadap PDB sektor pertanian. Indikator tersebut mengalami penurunan dari 8,7 persen pada PELITA IV menjadi 5,5 pada PELITA V, menurun menjadi 3,6 persen pada PELITA VI (World Bank, 1994). Perubahan tersebut menyebabkan kemampuan sektor pertanian dalam menciptakan output, pendapatan dan nilai tambah cenderung menurun. Peran sektor pertanian dalam penyerapan tenaga kerja tetap tinggi, terlihat dari kemampuan sektor ini untuk menampung sekitar 42-43 juta tenaga kerja pada tahun 2005-2009 (BPS, 2009). Jumlah ini meningkat jika dibandingkan periode sebelumnya (1997 dan 1982), meskipun kontribusinya menurun dari 54,95 persen (1982) menjadi 42-43 persen (2005-2009).

Permasalahan ekonomi ketenagakerjaan pertanian sampai saat ini, antara lain adalah : (1) Semakin meningkatnya Rumah Tangga Pertanian (RTP), sementara lahan pertanian mengalami penurunan akibat adanya konversi lahan sehingga pemilikan lahan semakin menurun; (2) Tenaga kerja muda dan berpendidikan tinggi semakin enggan bekerja di sektor pertanian; (3) Peranan sektor pertanian pada PDB semakin menurun, namun tidak diikuti menurunnya penyerapan tenaga kerja, sehingga produktivitas tenaga kerja pertanian menurun; dan (4) Upaya-upaya peningkatan produksi masih menghadapi berbagai kendala.

Berdasarkan latar belakang di atas, tulisan ini akan mengulas permasalahan dan strategi pengembangan ekonomi ketenagakerjaan pertanian, khususnya dalam aspek (1) Sektor pertanian menjadi tumpuan penyerapan tenaga kerja di perdesaan; (2) Pengangguran tidak kentara di sektor pertanian yang relatif tinggi; (3) Pendidikan tenaga kerja sektor pertanian masih rendah; dan (4) Meningkatnya tenaga kerja berusia lanjut dan kurang minatnya tenaga kerja bekerja di sektor pertanian.

PERMASALAHAN DAN KEBIJAKAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA PERTANIAN

Pembangunan ekonomi yang dipilih saat ini adalah dengan menerapkan “Strategi Tiga Jalur (*Triple Tracks Strategy*), yakni : stabilitas ekonomi makro; pengembangan sektor riil, utamanya melalui pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil; serta revitalisasi pertanian dan perdesaan (Krisnamurthi, 2009). Strategi tersebut telah dijadikan panduan dalam menggerakkan ekonomi melalui berbagai kebijakan pemerintah. Tiga jalur ini berasaskan *pro-growth*, *pro-employment*, dan *pro-poor* dalam setiap program pembangunan ekonomi, sehingga diharapkan dapat memecahkan masalah ketenagakerjaan yaitu pengangguran dan kemiskinan.

Peran Sektor Pertanian dalam Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja sektor pertanian perkotaan pada tahun 2005 sebesar 5,3 persen dibandingkan dengan perdesaan sebesar 44 persen (Bappenas, 2006). Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan tumpuan hidup tenaga kerja di perdesaan. Fakta-fakta berikut mendukung fenomena tersebut. Berdasarkan data Sakernas, secara agregat (perdesaan dan perkotaan) pada periode tahun 1985-2003, penyerapan tenaga kerja pertanian cenderung menurun dari 54 persen menjadi 46 persen, walaupun secara absolut meningkat sebesar 23 persen (Malian *et al.*, 2004; Rusastra dan Suryadi, 2004; Bappenas, 2006). Sementara itu, pekerja sektor pertanian di perdesaan selama kurun waktu 1985-2003 relatif tidak berubah. Pangsa tenaga kerja pertanian di perdesaan masih berkisar pada angka 60-67 persen (Malian *et al.*, 2004). Dalam kurun waktu 20 tahun, penyerapan tenaga kerja pertanian di perdesaan meningkat sebesar 12 persen.

Selanjutnya Malian *et al.* (2004), menyatakan bahwa pada sektor pertanian, subsektor tanaman pangan hingga kini masih menjadi andalan dalam penyerapan tenaga kerja. Selama periode 1971-2000 subsektor tanaman pangan mampu menyerap rata-rata 44,38 persen, jauh di atas kemampuan subsektor lainnya yang rata-rata kurang dari 5 persen. Jika lebih dicermati pangsa penyerapan tenaga kerja subsektor tanaman pangan menurut jenis komoditas ternyata komoditas padi memiliki pangsa terbesar (15,51%), komoditas sayuran dan buah-buahan (14,58%) disusul komoditas umbi-umbian, jagung, kacang-kacangan dan tanaman bahan makanan lain masing-masing dengan pangsa 6,27, 3,88, 2,19 dan 1,96 persen. Dinamika penyerapan tenaga kerja pada komoditas padi pada periode tahun 1980-2000 relatif tetap, dan terjadi penurunan pada komoditas palawija (jagung, kacang-kacangan dan umbi-umbian). Sementara itu, proporsi penyerapan tenaga kerja pada komoditas sayuran dan buah-buahan pada periode yang sama cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa padi masih merupakan komoditas utama, namun peranan palawija semakin menurun bergeser ke arah komoditas hortikultura yang bernilai ekonomi lebih tinggi (*high economic value commodity*).

Sementara itu, komoditas perkebunan utama seperti kelapa, tebu, tembakau dan kopi selama periode 1971-2000 hanya mampu menyerap tenaga kerja rata-rata kurang dari satu persen dari total penyerapan tenaga kerja pertanian. Pada awal tahun 1970-an komoditas yang menyerap tenaga kerja relatif besar adalah kelapa, karet, tembakau. Dalam perkembangannya, penyerapan tenaga kerja pada ketiga komoditas tersebut cenderung menurun. Penyerapan tenaga kerja tahun 2000 pada sub-sektor perkebunan relatif merata pada komoditas tebu, kelapa, kelapa sawit, kopi, tembakau, karet, sementara untuk komoditas lain masih relatif rendah (Malian *et al.*, 2004).

Penyerapan tenaga kerja sektor pertanian yang masih relatif tinggi, akibat dari rendahnya daya serap tenaga kerja sektor industri. Padahal kita ketahui bersama bahwa sektor industri memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat, fenomena ini jelas akan memberatkan sektor pertanian. Sebagai contoh, pada saat krisis ekonomi, penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian meningkat sementara sektor-sektor yang lain mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja besar-besaran (Supriyati dan Syafa'at, 2000).

Gambaran penyerapan tenaga kerja di tingkat wilayah, akan dilengkapi dengan gambaran di tingkat rumah tangga pertanian. Rumah tangga pertanian pada dua dasawarsa terakhir cenderung meningkat, dari 18,4 juta pada tahun 1983 menjadi 25,6 juta pada tahun 2003 atau meningkat sekitar 39 persen. Dalam periode 20 tahun tersebut, rumah tangga pertanian di luar Jawa meningkat dengan laju yang lebih besar dibandingkan dengan di Jawa, yaitu 28,4 vs 53,9 persen. Hal ini antara lain disebabkan karena lahan pertanian di Jawa semakin terbatas akibat penambahan penduduk dan konversi lahan pertanian ke nonpertanian.

Berdasarkan Sensus Pertanian 2003, jumlah tenaga kerja pertanian di Indonesia pada tahun 2003 sebesar 83,6 juta orang, menyebar relatif sama di Jawa

dan luar Jawa. Sementara itu, luas wilayah Jawa jauh lebih kecil dibandingkan dengan luar Jawa, dengan demikian kepadatan tenaga kerja per luasan lahan pertanian di Jawa jauh lebih tinggi dibandingkan luar Jawa. Dalam periode 20 tahun, tenaga kerja pertanian di Indonesia meningkat sekitar 26 persen, sementara peningkatan rumah tangga pertanian sebesar 39 persen. Hal ini mengindikasikan semakin kecil rata-rata tenaga kerja pertanian per rumah tangga, terutama di Jawa. Hal ini kemungkinan besar terkait dengan keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) pada tahun 1980an.

Apabila dicermati antarwilayah, nampaknya pertumbuhan tenaga kerja pertanian di luar Jawa pada periode yang sama lebih tinggi dibandingkan dengan di Jawa, 50 persen vs 8 persen. Hal ini sesuai dengan pertumbuhan rumah tangga pertanian di luar Jawa yang lebih tinggi. Proporsi tenaga kerja pertanian di Indonesia tahun 2003 sebesar 82 persen dari total anggota rumah tangga, sementara di Jawa sebesar 84 persen dan 79 persen di luar Jawa (Tabel 1). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggota rumah tangga adalah tenaga kerja. Proporsi tenaga kerja pertanian di Provinsi Sumatera Barat, NTB, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan relatif sama, berkisar antara 78-80 persen. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara jumlah tenaga kerja pertanian laki-laki dan perempuan (Lokollo *et al.*, 2007).

Tabel 1. Tenaga Kerja di Sektor Pertanian di Indonesia, 2003

Wilayah	Tenaga Kerja (%)		
	Laki-Laki	Perempuan	Total
Jawa	84,70	84,94	84,82
Luar Jawa	79,90	79,51	79,71
Indonesia	82,21	82,14	82,17
Total Tenaga Kerja (000 Orang)	42.637	40.946	83.583

Sumber: Sensus Pertanian 2003, BPS, diolah

Dari total tenaga kerja di sektor pertanian ternyata tidak seluruhnya bekerja. Secara garis besar, jenis kegiatan dari tenaga kerja pertanian dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu petani, buruh tani dan buruh nonpertanian. Pada tahun 1983, dari jumlah tenaga kerja pertanian yang bekerja, sebagian besar bekerja sebagai petani (67%), buruh tani (21%) dan buruh nonpertanian sebesar 11 persen (Tabel 2). Di Jawa pada tahun yang sama, dibandingkan dengan gambaran nasional, proporsi petani lebih kecil dibandingkan dengan buruh tani, hal yang sebaliknya terjadi di Luar Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa daya dukung sektor pertanian di Jawa sudah semakin terbatas. Pada tahun 2003, secara nasional proporsi petani menurun (60%), sementara proporsi buruh tani (25%) dan buruh nonpertanian (15%) meningkat. Kecenderungan yang sama juga terjadi di Jawa dan luar Jawa, namun di luar Jawa proporsi petani masih lebih tinggi

dibandingkan dengan Jawa, dan sebaliknya untuk proporsi buruh tani dan buruh nonpertanian.

Tabel 2. Tenaga Kerja Pertanian yang Bekerja menurut Jenis Kegiatan di Indonesia, Tahun 1983- 2003

Tahun/Wilayah	Jenis Pekerjaan		
	Petani	Buruh Tani	Buruh Nonpertanian
1983 (%)			
Jawa	62,57	25,45	11,96
Luar Jawa	75,56	14,3	10,14
Indonesia	67,61	21,13	11,27
2003 (%)			
Jawa	54,15	28,6	17,25
Luar Jawa	68,03	20,03	11,94
Indonesia	60,34	24,77	14,88
Pertumbuhan 1983-2003 (%)			
Jawa	17,72	50,24	92,46
Luar Jawa	52,98	137,94	100,07
Indonesia	31,87	73,26	95,18

Sumber: Sensus Pertanian, 1983 dan 2003, BPS.

Dalam periode 20 tahun, terjadi pergeseran yang cukup signifikan, proporsi petani menurun dan buruh tani meningkat baik di Indonesia, Jawa maupun luar Jawa. Ada gejala lain, yaitu meningkatnya proporsi buruh nonpertanian di Indonesia, hal ini disebabkan karena meningkatnya proporsi buruh nonpertanian di Jawa. Fenomena ini menunjukkan bahwa di Jawa telah terjadi pergeseran tenaga kerja dari pertanian ke nonpertanian, namun sifatnya masih terbatas. Sektor pertanian masih menjadi tumpuan hidup rumahtangga pertanian. Kajian-kajian Malian *et al.* (2004); Rusastra dan Suryadi (2004), Rusastra *et.al.* (2005), dan Bappenas (2006) menunjukkan kecenderungan yang sama. Hal ini antara lain disebabkan karena semakin terbatasnya lahan pertanian, semakin terbukanya kesempatan kerja nonpertanian, serta semakin meningkatnya pendidikan. Sementara di luar Jawa, proporsi buruh nonpertanian relatif tetap.

Kasus di luar Jawa (Provinsi Sumatera Barat, NTB, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan) jenis kegiatan petani masih dominan (77-88%) dibandingkan dengan kegiatan buruh pertanian (7-17%) dan nonpertanian (4-6%). Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian di luar Jawa masih merupakan kesempatan kerja utama, dan kesempatan kerja nonpertanian masih terbatas (Rusastra *et al.*, 2005, Lokollo *et al.*, 2007).

Sektor pertanian yang masih menjadi tumpuan penyerapan tenaga kerja, menimbulkan permasalahan serius. *Pertama*, ketika alokasi anggaran untuk

pembangunan pertanian semakin berkurang. Rasio alokasi pengeluaran pemerintah untuk sektor pertanian terhadap PDB sektor pertanian terus menurun, yaitu 8,7 persen pada PELITA IV menjadi 5,5 PELITA V dan 3,6 persen pada PELITA VI (World Bank, 1994). Diperkirakan alokasi anggaran pembangunan pertanian pada saat ini kurang dari 5 persen. Todaro (2000) mengemukakan bahwa struktur perekonomian suatu negara tergantung kepada beberapa faktor baik faktor ekonomi, struktur politik, kekuatan (*power*) dan *interest group*. Faktor ekonomi meliputi karakter ekonomi (*nature of economy*), struktur ekonomi, dan tingkat ketergantungan antara sektor-sektor primer, sekunder dan tersier. Sektor primer meliputi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; sedangkan sektor sekunder adalah sektor manufaktur; dan sektor tersier adalah sektor perdagangan, keuangan, transportasi dan jasa.

Kedua, ketika pertumbuhan sektor pertanian semakin melemah, yang diindikasikan dengan semakin menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDB, hanya sebesar 13,1-14,4 persen tahun 2005-2009. Sebagai ilustrasi, pada tahun 2009 sektor industri menyumbang PDB hampir 30 persen dan hanya hanya menyerap 12,1 persen tenaga kerja. Sektor perdagangan-rumah makan-hotel dengan kontribusi sekitar 14 persen hanya mampu menyerap 20,9 persen tenaga kerja. Sektor pertambangan dan penggalian dengan kontribusi terhadap PDB sekitar 11 persen hanya menyerap 1,1 persen tenaga kerja. Ini berarti bahwa sektor pertanian menjadi tumpuan penyerapan tenaga kerja, namun dengan produktivitas tenaga kerja yang relatif kecil dibandingkan sektor lain.

Ketiga, ketika kesempatan kerja nonpertanian di pedesaan masih terbatas dan makin meningkatnya pangsa buruh tani. Dalam periode 20 tahun telah terjadi pergeseran yang cukup signifikan, proporsi petani menurun, sedangkan buruh tani meningkat baik di Indonesia, Jawa maupun luar Jawa. Meskipun telah terjadi peningkatan proporsi buruh nonpertanian terutama di Jawa, namun dayaserapnya masih sangat terbatas.

Pengangguran Tidak Kentara di Sektor Pertanian

Berdasarkan pendekatan penggunaan tenaga kerja (*labor utilization approach*), angkatan kerja dibedakan dalam tiga golongan, yaitu (a) **Menganggur**, orang yang sama sekali tidak bekerja (*open unemployed*) dan sedang berusaha mencari kerja; (b) **Setengah menganggur** (*under employed*), mereka yang kurang dimanfaatkan dalam bekerja (*under utilized*) dilihat dari segi jam kerja, produktivitas kerja dan pendapatan; dan (c) **Bekerja penuh** atau dimanfaatkan secara optimal.

Khusus untuk golongan setengah penganggur dapat dikelompokkan lebih lanjut menjadi: (a) Setengah pengangguran kentara (*visible underemployed*), yakni mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu; dan (b) Setengah penganggur tak kentara (*invisible underemployed*) atau penganggur terselubung (*disguised*

unemployed), yakni mereka yang produktivitas kerja dan pendapatannya rendah. Kelompok yang terakhir ini dalam kenyataannya sulit diukur.

Berkaitan dengan curahan jam kerja individu, kajian Malian *et al.* (2004), memperlihatkan bahwa sesuai dengan karakteristik kegiatan pertanian, yang aktivitasnya sangat tergantung pada musim tanam, maka pangsa pekerja setengah pengangguran relatif cukup tinggi dibandingkan dengan sektor nonpertanian dan sebaliknya untuk yang bekerja penuh. Sampai menjelang krisis, pangsa pekerja setengah pengangguran di sektor pertanian sebenarnya sempat mengalami penurunan hingga mendekati 60 persen, namun setelah krisis pangsaanya kembali meningkat dan bahkan pada tahun 2003 mencapai 73 persen. Tingginya pangsa setengah pengangguran di sektor pertanian akhir-akhir ini menunjukkan bahwa sektor pertanian benar-benar berfungsi sebagai penampung tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya pada saat krisis ekonomi, namun kurang diimbangi dengan pengembangan sektor pertanian itu sendiri. Kondisi ini apabila tidak segera ditangani akan semakin mendorong jumlah petani gurem.

Fenomena semakin banyaknya tenaga kerja di sektor pertanian, dapat diperjelas dengan melihat pangsa tenaga kerja setengah pengangguran sektor pertanian di perdesaan yang mencapai 80 persen lebih dibandingkan dengan sektor nonpertanian. Kondisi ini menunjukkan bahwa daya dukung sektor pertanian kurang seimbang dengan jumlah tenaga kerja yang terlibat di dalamnya.

Berkaitan dengan curahan jam kerja, Simatupang dan Mardianto (1996) menyatakan bahwa sifat yang akomodatif dari sektor pertanian terhadap penyerapan tenaga kerja, telah mengakibatkan sektor pertanian terpaksa menampung tenaga kerja yang melebihi kapasitasnya, sehingga menanggung beban pengangguran yang tinggi. Hal ini paling tidak terlihat dari masih tingginya pekerja pertanian yang bekerja tidak penuh, seperti yang telah dibahas sebelumnya. Oleh karena itu, industrialisasi perdesaan menjadi suatu program yang harus segera dilaksanakan untuk mengurangi jumlah pengangguran dan setengah pengangguran di perdesaan. Pengembangan industrialisasi di perdesaan untuk mendorong tenaga kerja pertanian keluar sektor industri saat ini sangat gencar dilaksanakan di RRC. Kebijakan industri perdesaan yang dilakukan oleh RRC sejak tahun 1980-an telah berhasil mengalihprofesikan sekitar 100 juta petani untuk bekerja pada sektor industri di perdesaan. Data tahun 1998 menunjukkan bahwa di RRC telah berdiri sekitar 22 juta perusahaan perdesaan yang bergerak di sektor industri berupa *Township and village enterprise* (Malian *et al.*, 2004).

Berdasarkan permasalahan yang terkait dengan sektor pertanian yang masih menjadi tumpuan penyerapan tenaga kerja di perdesaan dan tingginya angka pengangguran tidak kentara di sektor pertanian, strategi yang ditawarkan adalah: *Pertama*, memperkuat politik pertanian baik melalui jalur birokrasi, legislatif, pelaku usaha (asosiasi-asosiasi agribisnis), maupun organisasi-organisasi petani (HKTI). Menurut Casper dan Streit (1998) komponen pelaku

dominan dalam pembuatan kebijakan publik antara lain adalah Partai Politik, Birokrat, dan Kelompok Kepentingan (*interest group*). Anggota partai politik diikat dengan program bersama yang merupakan agenda partai. Sedangkan birokrat biasanya memiliki keahlian dan pengalaman, namun sulit diketahui informasi dan kinerja yang dimilikinya, serta dalam praktek pemerintahan yang mendominasi dalam pengambilan keputusan publik. Sementara itu, kelompok kepentingan biasanya terorganisir dengan baik dan memiliki dana yang kuat untuk mempengaruhi keputusan publik. Dapat dibayangkan kalau partai politik kurang ada yang menyuarakan kepentingan petani, birokrat pertanian yang kurang memiliki *bargaining position* dalam kabinet, serta organisasi-organisasi petani yang kalah lantang dalam menyuarakan kepentingannya. Hasilnya adalah alokasi anggaran yang terus menurun dari waktu ke waktu. Bautista dan Valdes (1993) dalam Daryanto (2009) menerbitkan buku yang berjudul "*The Bias Against Agriculture: Trade and Macroeconomic Policies in Developing Countries*". Dalam buku tersebut, disimpulkan bahwa pada umumnya di negara-negara maju, pemerintah mereka berpihak pada sektor pertanian dan perdesaan (*rural biased policies*), sementara di negara-negara berkembang, kebijakan pemerintah justru tidak berpihak kepada sektor pertanian dan perdesaan (*urban biased policies*). Selanjutnya dikemukakan bahwa kebijakan yang berpihak kepada sektor pertanian dapat mempercepat terjadinya distribusi manfaat yang bersifat "*positive-sum game*" dalam sistem pertanian dan berpeluang menciptakan pertumbuhan yang memberikan manfaat bagi banyak pihak (*inclusive growth*).

Kedua, mempercepat proses transformasi melalui transisi pengembangan agroindustri berbasis komoditas unggulan di perdesaan. Agroindustri yang memiliki kemampuan sebagai masa transisi untuk mendorong proses transformasi dari sektor pertanian ke arah sektor industri harus memenuhi syarat sebagai berikut : (a) Produk industri yang dikembangkan berbasis komoditas unggulan nasional dan spesifik daerah, sehingga meningkatkan nilai tambah produk pertanian; (b) Mempunyai kaitan yang luas baik kaitan ke industri hulu (*backward linkage*) maupun kaitan ke industri hilir (*forward linkage*); (c) Memiliki permintaan pasar yang luas baik pasar lokal, regional maupun ekspor, sehingga produk yang dikembangkan sesuai dinamika permintaan pasar dan dinamika preferensi konsumen; (d) Nilai tambah yang diciptakan didistribusikan secara adil di antara pelaku-pelaku yang tercakup, sehingga terjadi sinergi optimum; (e) Bersifat padat tenaga kerja, sehingga mampu menyerap tenaga kerja secara luas, sebagai prasyarat menuju industrialisasi; (f) Ketersediaan modal sesuai dengan tahap perkembangan skala usaha dan kematangan usaha agroindustri yang dikembangkan; (g) Memiliki kandungan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai tahap perkembangan agroindustri yang dikembangkan; (h) Memiliki kandungan jiwa kewirausahaan (*entrepreneurship*) yang tinggi sebagai energi penggerak agroindustri; serta (i) Lokasi pengembangan pada daerah sentra produksi komoditas unggulan.

PERMASALAHAN DAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS TENAGA KERJA PERTANIAN

Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja Pertanian

Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dalam membentuk kualitas dan kapasitas sumberdaya manusia. Segala upaya pembangunan akan berhasil dengan baik jika kualitas sumberdaya manusia sebagai pelaku pembangunan memiliki kapasitas yang lebih baik. Todaro (2000) mengemukakan bahwa negara-negara dunia ketiga telah meyakini bahwa pembangunan sektor pendidikan adalah kunci utama dalam pembangunan nasional. Hal ini dapat dipahami karena perkembangan kemampuan kapasitas sumberdaya manusia (*skill and knowledge*) ditentukan oleh pendidikan terutama lembaga pendidikan formal.

Tingkat pendidikan dibutuhkan untuk mendukung kemampuan seseorang dalam bekerja, namun hal tersebut tidaklah mutlak karena masih ada faktor lain yang menentukan seorang individu harus bersikap dalam pekerjaan. Perkembangan tingkat pendidikan pekerja sektor pertanian selama kurun waktu 1982-2003 cukup mengesankan. Selama kurun waktu tersebut, pangsa pekerja pertanian yang tidak pernah mengenyam pendidikan dan berpendidikan rendah (tidak/belum tamat Sekolah Dasar) turun drastis. Kondisi yang sebaliknya terjadi pada pekerja yang tamat SD, SMTP Umum dan SMTA Umum, mengalami peningkatan cukup besar. Hasil analisis Sensus Pertanian 1983-2003 juga menunjukkan gambaran yang relatif sama, yaitu semakin meningkatnya pendidikan pekerja pertanian dalam kurun waktu 20 tahun terakhir (Malian *et al.*, 2004).

Gambaran di tingkat rumahtangga pertanian, menunjukkan bahwa pada tahun 2003 proporsi anggota rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian (Tabel 3) didominasi oleh anggota rumah tangga dengan tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) yaitu 46,19 persen dan anggota rumah tangga yang tidak tamat Sekolah Dasar sebesar 13,67 persen. Sementara itu, anggota rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian dengan tingkat pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) mencapai 10,67 persen dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) adalah 8,95 persen. Pada era globalisasi, untuk memenuhi permintaan barang-barang dari produk pertanian dituntut adanya respon yang inovatif terhadap perubahan baru sesuai permintaan. Konsekwensinya diperlukan sumberdaya manusia pertanian yang terdidik, karena hanya dengan pendidikan mereka akan menjadi lebih responsif, aspiratif, mudah menyikapi, memiliki ide dan nilai (Todaro, 2000).

Dominasi anggota rumah tangga berpendidikan rendah yang bekerja di sektor pertanian menunjukkan bahwa sektor ini kurang diminati oleh mereka yang berpendidikan lebih tinggi. Faktor penjelasannya adalah sebagai berikut: (a) Sektor pertanian secara inherent tidak mampu memberikan perbedaan upah (*wage*

differential) dan tidak menuntut persyaratan tingkat pendidikan tertentu. Sementara itu, sektor nonpertanian (modern sektor) mampu memberikan perbedaan upah yang nyata dan tingkat pendidikan secara jelas menjadi syarat untuk akses ke sektor modern; (b) Jaminan untuk sukses bekerja di sektor pertanian lebih rendah dibanding dengan sektor nonpertanian, baik dari sisi besaran upah yang diberikan maupun dari sisi prospek jenjang status pekerjaan. Sektor pertanian hampir tidak memiliki penjenjangan pekerjaan, yang ada adalah jenis pekerjaan (mencangkul, menyang, menyemprot, memanen, dll); dan (c) Rumah tangga pertanian dihadapkan dengan masalah biaya tunai pendidikan (*direct cost of education*), yang menyebabkan tingginya proporsi anggota rumah tangga dengan tingkat pendidikan yang rendah. Hal ini diperparah dengan nilai tukar produk pertanian yang rendah.

Tabel 3. Proporsi Anggota Rumah Tangga Pertanian (≥ 10 tahun) yang Bekerja di Sektor Pertanian menurut Tingkat Pendidikan di Indonesia, 1983-2003

Tingkat Pendidikan	Persentase Anggota Rumah Tangga		
	1983	1993	2003
1. Tidak sekolah	28,42	19,36	8,08
2. Tidak/belum Lulus SD	36,31	32,09	13,39
3. SD	29,06	36,67	46,19
4. SLTP	3,82	7,18	10,67
5. SLTA	1,96	4,32	8,95
6. Diploma/Perguruan Tinggi	0,13	0,38	1,73
Jumlah Angkatan kerja (juta orang)	26,53	29,64	34,08

Sumber: BPS, Sensus Pertanian 1983 (Series I), 1993 (Series D1), dan 2003 (Series C).

Strategi untuk mengatasi masalah rendahnya tingkat pendidikan di sektor pertanian adalah dengan meningkatkan pendidikan formal dan non-formal, yang berfungsi memberi pencerahan kepada tenaga kerja, sehingga menumbuhkan keberdayaan melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga kerja pertanian. Ada dua jalur pendidikan yang dapat ditempuh yaitu pendidikan formal dan pendidikan non-formal yang ditujukan untuk angkatan kerja. Pengembangan kurikulum di Perguruan Tinggi diharapkan dapat menghasilkan sarjana-sarjana yang ahli dan siap pakai di bidang pertanian dalam arti luar (agribisnis dan agroindustri) khususnya di fakultas pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan kedokteran hewan, perikanan. Penyediaan tenaga-tenaga penyuluh lapang yang memiliki kemampuan spesialis untuk bidang agribisnis. Pengembangan program-program pembangunan pertanian melalui pendekatan Sekolah Lapang (SL), seperti Sekolah Lapang -Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT), Sekolah Lapang Pengelolaan Sumberdaya Terpadu (SL-PTT), dan ke depan dapat dikembangkan SL-Agribisnis berbasis komoditas unggulan.

Partisipasi Tenaga Kerja Muda Pertanian

Berdasarkan usia pekerja, komposisi pekerja di sektor pertanian relatif lebih berimbang dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain. Namun demikian, selama kurun waktu 1982-2003 komposisi pekerja sektor pertanian berdasarkan usia telah mengalami pergeseran. Pada tahun 1982, pekerja sektor pertanian masih didominasi oleh pekerja yang berusia di bawah 30 tahun (38%), sementara jumlah pekerja yang berusia 30-44 tahun (32%), 45-59 tahun (22%) dan di atas 60 tahun sebesar 7,5 persen. Dua dekade kemudian, komposisinya berubah, yaitu jumlah pekerja yang berumur di bawah 30 tahun semakin menurun menjadi 26 persen, sementara pekerja dengan usia 30-44 tahun, 45-59 tahun, di atas 60 tahun meningkat masing-masing menjadi sekitar 36, 25 dan 12 persen (Malian *et al.*, 2004).

Pada tingkat rumahtangga pertanian, petani di Indonesia sebagian besar berada pada golongan umur 25-44 tahun dengan proporsi 41,1 persen Jawa dan 44,7 persen di Luar Jawa, kemudian menyusul golongan umur 45-60 persen, proporsi tenaga kerja golongan usia lanjut (>60 tahun) sekitar 13,8 persen, dan terendah adalah golongan muda yang hanya 9,2 persen. Pangsa jumlah pekerja laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja perempuan, jumlah tenaga kerja laki-laki mencapai 25,61 juta orang (71,9%) versus tenaga kerja perempuan hanya 9,83 juta orang (28,1%). Gambaran pekerja pertanian di Jawa dan Luar Jawa agak berbeda, seperti terlihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Proporsi Anggota Rumahtangga sebagai Petani menurut Golongan Umur di Indonesia, 2003 (Persen)

Wilayah/ Jenis Kelamin	Golongan Umur				Total (000 Orang)
	10-24	25-44	45-60	>60	
Jawa					
Laki-laki	4,3	40,9	36,7	18,2	13.048
Perempuan	7,1	41,7	34,0	17,2	4.333
Total	5,0	41,1	36,0	17,9	17.381
Luar Jawa					
Laki-laki	11,9	48,0	29,5	10,6	12.110
Perempuan	17,3	48,7	26,0	8,0	5.501
Total	13,5	48,3	28,4	9,8	17.612
Indonesia					
Laki-laki	7,8	44,4	33,2	14,5	25.158
Perempuan	12,8	45,6	29,5	12,1	9.834
Total	9,2	44,7	32,2	13,8	34.993

Sumber: Sensus Pertanian 2003, BPS, diolah

Berdasarkan struktur tenaga kerja menurut golongan umur, nampak bahwa kelompok muda (10-24 tahun) adalah paling rendah. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor, antara lain adalah sebagian penduduk pada golongan tersebut

masih sekolah dan faktor kurang terariknya tenaga kerja muda di sektor pertanian. Karena sektor pertanian terkesan tradisional, kumuh, dan kurang menjanjikan dari segi pendapatan. Ke depan tanpa adanya perubahan cara pandang tersebut akan menjadikan sektor pertanian semakin tertinggal.

Gambaran buruh pertanian menurut golongan umur berbeda dengan petani, secara agregat usia buruh tani antara 25-44 tahun, dan proporsi buruh tani usia lanjut berkisar 5-7 persen (Tabel 5). Usia buruh tani di Jawa dan luar Jawa sebagian besar dalam kisaran 25-44 tahun. Proporsi buruh tani usia lanjut di Jawa lebih tinggi dibandingkan dengan luar Jawa. Proporsi buruh tani usia lanjut di provinsi contoh relatif kecil, berkisar antara 3,5-5,2 persen, sementara usia buruh tani seperti halnya gambaran luar Jawa pada kisaran 25-44 tahun.

Tabel 5. Proporsi Anggota Rumah Tangga sebagai Buruh Tani menurut Golongan Umur di Indonesia, 2003 (Persen)

Wilayah/ Jenis Kelamin	Golongan Umur				Total (000 Orang)
	10-24	25-44	45-60	>60	
Jawa					
Laki-laki	12,0	47,1	32,3	8,7	5.442
Perempuan	9,2	53,5	30,7	6,6	3.745
Total	10,8	49,7	31,7	7,8	9.187
Luar Jawa					
Laki-laki	24,7	50,2	21,0	4,1	3.289
Perempuan	21,0	54,3	21,5	3,2	1.890
Total	23,3	51,7	21,2	3,8	5.178
Indonesia					
Laki-laki	16,8	48,3	28,0	6,9	8.731
Perempuan	13,2	53,8	27,7	5,4	5.635
Total	15,3	50,5	27,9	6,3	14.365

Sumber: Sensus Pertanian 2003, BPS, diolah

Uraian di atas mendukung pendapat umum bahwa semakin meningkatnya jumlah pekerja yang berusia lanjut di sektor pertanian. Hal ini dapat terjadi, karena: (1) Pekerjaan sebagai petani dapat dilakukan sepanjang yang bersangkutan masih mampu untuk pergi dan mengurus lahan pertaniannya; (2) Sektor pertanian bersifat akomodatif terhadap penyerapan tenaga kerja, dan (3) Pasar tenaga kerja pertanian bersifat pasar non barrier (Malian *et al.*, 2004; Simatupang dan Mardianto, 1996; Rusastra *et al.*, 2005).

Strategi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan ini adalah merubah pandangan generasi muda tentang stigma pertanian terbelakang. Daryanto (2009) memberikan beberapa langkah membangun karakteristik generasi

muda melalui 6 C yang harus dimiliki generasi muda. Pertama yang perlu ditingkatkan *Confidence*, kepercayaannya yang tentu diiringi dengan C yang kedua yakni *Character* yang baik seperti jujur, bertanggung jawab, disiplin dan sifat-sifat unggul lainnya. C yang ke tiga *Competence* baik pendidikan formal maupun informal, yang ke empat *Connection*, dengan adanya koneksi (jaringan) akan mempercepat karir, *network* bisnis, teknologi, informasi dan lainnya. C yang ke lima *Care*, kepedulian dan C yang terakhir adalah *Contribution* pada diri sendiri dan keluarga.

Setelah terbangun karakter pemuda, maka untuk merubah supaya pemuda tertarik pada pertanian dan tidak meninggalkan perdesaan maka harus kita bangun apa yang disebut industrialisasi perdesaan. Untuk memperkuat ketertarikan generasi muda pada pertanian kita perlu membangun “6 I”. I yang pertama adalah peningkatan *incentive* dapat dilakukan melalui subsidi benih, pupuk dan menjaga stabilitas harga produk pertanian. Kedua adalah harus ada *Investment* yang masuk dari luar maupun domestik. I yang ketiga adalah pentingnya membangun *infrastructure* perdesaan seperti sarana transportasi, energi, komunikasi, pendidikan dan lain sebagainya. Ini harus tersedia untuk membuka akses industri masuk ke perdesaan dan hasil panen mudah didistribusikan. I yang ke empat sangat terkait dengan generasi muda yakni *Innovation* bagaimana agar industri pertanian juga inovatif di bidang teknologi informasi. Ke lima adalah *Industry*. Pertanian harus menjadi industri yang menghasilkan *final product* bukan hanya menghasilkan *raw material* saja. Sehingga dapat menciptakan nilai tambah yang tinggi di sektor hilir karena marginnya yang besar. Masalah *branding* merupakan ekonomi kreatif yang biasanya dipunyai dan disukai oleh generasi muda. Dalam *branding* termasuk di dalamnya adalah *packing*, *processing*. Sementara yang terakhir ialah *Institution*. Salah satu contoh yang bagus kelembagaan pertaniannya adalah di Taiwan, di mana *Farmer Assosiation* melakukan penggarapan berbagai kegiatan dari penyediaan sarana produksi, kredit, informasi, kegiatan usahatani, serta penanganan pasca panenya.

KEBIJAKAN STRATEGIS PENGEMBANGAN EKONOMI KETENAGAKERJAAN PERTANIAN

Berdasarkan pada permasalahan pokok ekonomi ketenagakerjaan pertanian Indonesia, dapat diajukan empat kebijakan strategis pengembangannya ke depan (Tabel 6), yaitu: (1) Memperkuat politik pertanian melalui jalur birokrasi, legislatif, pelaku usaha, dan organisasi petani; (b) Mempercepat proses transformasi melalui pengembangan agroindustri berbasis komoditas unggulan di perdesaan; (c) Meningkatkan pendidikan formal dan nonformal untuk meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan akses ekonomi tenaga kerja pertanian; dan (d) Merubah pandangan generasi muda tentang stigma pertanian, melalui pendidikan, pelatihan, sistem insentif, dan modernisasi sektor pertanian.

Tabel 6. Matriks Opsi Kebijakan Ekonomi Ketenagakerjaan Pertanian di Indonesia

Masalah Pokok	Penyebab	Strategi Kebijakan	Tidak Lanjut
1. Tingginya penyerapan tenaga kerja dan pengangguran tidak kentara di sektor pertanian	Rendahnya kesempatan kerja di perdesaan	1. Memperkuat politik pertanian baik melalui jalur birokrasi, legislatif, pelaku usaha (asosiasi-asosiasi agribisnis), maupun organisasi-organisasi petani (HKTI) 2. Mempercepat proses transformasi melalui pengembangan agroindustri berbasis komoditas unggulan di perdesaan.	Mempercepat Pengembangan agroindustri di perdesaan yang dibarengi dengan peningkatan politik pertanian di semua jalur
2. Rendahnya tingkat pendidikan di sektor pertanian	Keterbatasan sarana pendidikan dan biaya	Meningkatkan pendidikan formal dan nonformal untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga kerja pertanian	Peningkatan program-program pembangunan pertanian melalui pendekatan Sekolah Lapang (SL), terutama SL agribisnis berbasis komoditas unggulan
3. Rendahnya partisipasi tenaga kerja muda di sektor pertanian	Kesalahan cara pandang generasi muda terhadap sektor pertanian, dimana sektor pertanian dianggap tradisional, kumuh, dan kurang menjanjikan dari segi pendapatan	Merubah pandangan generasi muda tentang stigma pertanian	Pembangunan karakter generasi muda yang tangguh dan cinta pertanian melalui program insentif

PENUTUP

Sampai sejauh ini sektor pertanian masih menerima beban yang besar dalam penyerapan tenaga kerja dan tidak berimbang dengan alokasi anggaran dan PDB sektor pertanian sehingga produktivitas tenaga kerja relatif rendah dibandingkan sektor lainnya. Rata-rata tingkat pendidikan masih tergolong rendah sehingga berpengaruh terhadap indek pembangunan manusia (*Human Development Index/HDI*) Indonesia. Rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja pertanian akan mempengaruhi adopsi teknologi yang pada gilirannya berdampak terhadap rendahnya produktivitas komoditas pertanian.

Beberapa strategi kebijakan dalam memecahkan permasalahan pokok ketenagakerjaan antara lain adalah : (1) Memperkuat politik pertanian baik melalui jalur birokrasi, legislatif, pelaku usaha (asosiasi-asosiasi agribisnis), maupun organisasi-organisasi petani (HKTI); (2) Mempercepat proses transformasi melalui transisi pengembangan agroindustri berbasis komoditas unggulan di perdesaan; (3) Meningkatkan pendidikan formal dan nonformal, yang berfungsi memberi pencerahan kepada angkatan kerja sehingga menumbuhkan keberdayaan melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM; dan (4) Merubah pandangan generasi muda tentang stigma pertanian terbelakang melalui pembentukan karakter pemuda yang tangguh dan cinta pertanian melalui berbagai sistem insentif, mendorong masuknya investasi, pembangunan infrastruktur pertanian di perdesaan, meningkatkan inovasi teknologi, pengembangan industri perdesaan berbasis komoditas unggulan, dan penguatan kelembagaan agribisnis.

DAFTAR PUSTAKA

- BAPPENAS. 2006. Analisis Tenaga Kerja, Rumah Tangga dan Lahan Pertanian. Jakarta
- BPS. 2004-2009. Statistik Indonesia. Badan Pusat Statistis Indonesia. Jakarta.
- Casper, Wolfgang and M. E. Streit. 1998. Institution Economics Social Order and Public Policy. Edward Elgar. Cheltenham, UK. Northampton, MA, USA.
- Daryanto, A. 2009. Dinamika Daya Saing Industri Peternakan. IPB Press. Bogor.
- Johnston, B. F. and Mellor, J. W., 1961. The Role of Agriculture in Economic Development. American Economic Review. 51 (4) : 566-593.
- Krisnamurthi, Bayu. 2009. Pengembangan Agribisnis Buah Indonesia. Bunga Rampai Agribisnis Seri Pemasaran. Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.
- Kuznet, S. 1964. Economic Growth and Contribution of Agriculture. In Eicher, C. K. and Witt, L. W. (eds). Agriculture in Economic Development. Mc.Graw Hill. New York.
- Lewis, W. A. 1954. Economic Development with Unlimited Supplies of Labour. Manchester School of Economic and Social Studies. 22 : 139-191.
- Lokollo, E. M., I.W. Rusastra, H.P. Saliem, Supriyati, S. Friyatno, G.S. Budhi. 2007. Dinamika Sosial Ekonomi Perdesaan: Analisis Perbandingan Antar Sensus Pertanian. Laporan Penelitian. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
- Malian, A.H., S. Friyatno, S. K. Dermoredjo, S. Mardiyanto, M. Suryadi, M. Maulana. 2004. Analisis Perkembangan Aset, Kesempatan Kerja dan Pendapatan Rumah Tangga di Sektor Pertanian. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.

- Rusastra, I.W. dan M. Suryadi. 2004. Ekonomi Tenaga kerja Pertanian dan Implikasinya dalam Peningkatan Produksi dan Kesejahteraan Buruh Tani. *Jurnal Litbang Pertanian*. Volume 23, No 3. pp. 91-99
- Rusastra, I.W., K.M. Noekman, Supriyati, E. Suryani dan M. Suryadi. 2005. Analisis Ekonomi ketenagakerjaan Sektor Pertanian dan Perdesaan di Indonesia. Pusat Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor.
- Simatupang, P. dan S. Mardianto. 1996. Pengaruh Kebijakan Moneter dan Kurs Valuta Asing Terhadap Transformasi Struktur Perekonomian Indonesia. Prosiding Seminar Nasional PERHEPI. Pertanian dan Perdesaan Indonesia dalam Transisi: Refleksi dan Prospektif. PERHEPI, Jakarta.
- Supriyati dan N. Syafa'at . 2000. Analisis Perubahan struktur Kesempatan Kerja di Indonesia, 1995 – 1998: Implikasinya pada peran sektor pertanian dalam penyerapan tenaga kerja dalam Prosiding Perspektif Pembangunan Pertanian dan Perdesaan dalam Era Otonomi Daerah, Puslitbang Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
- Timmer, P. 2005. Agriculture and Pro-Poor Growth: An Asian Perspective. Working Paper 63, Center for Global Development. Washington, DC. July 21, 2005:1-17.
- Todaro, M.P. 2000. Economic Development. Seventh Edition. An Imprint of Addison Wesley Longman, Inc. New York.
- World Bank, 1994. World Development Report 1994. Oxford University Press.